

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini disajikan tinjauan pustaka pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Penulis pada bab ini akan disajikan sebagai berikut: pertama tinjauan pustaka untuk menggambarkan konsep dasar dari variable yang akan diteliti; kedua ialah penelitian terdahulu; dan terakhir adalah tentang kerangka hipotesis yang diajukan.

##### **2.1.1 Kemiskinan**

###### **2.1.1.1 Pengertian kemiskinan**

Sahdan (2018) kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variable itu dihasilkan serangkain strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk yaitu:

- (1) Kemiskinan absolut :

Bila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

(2) Kemiskinan relatif:

Kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

(3) Kemiskinan kultural:

Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

(4) Kemiskinan struktural:

Situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

kemiskinan sering kali diukur dengan menggunakan berbagai indikator dan metode pengukuran kemiskinan yang telah dikembangkan oleh pemerintah, lembaga internasional, dan peneliti akademis. Misalnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index) dapat memberikan gambaran tentang tingkat keparahan kemiskinan dengan menghitung rata-rata kedalaman kemiskinan di antara populasi yang terpengaruh. Pentingnya memahami keparahan kemiskinan

adalah untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat guna untuk mengurangi atau mengatasi dampak negatif kemiskinan tersebut, serta memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dialokasikan dengan efektif untuk membantu individu atau kelompok yang paling membutuhkan.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 2018). Salah satu program prioritas Gubernur terpilih (2018-2023) Ridwan Kamil yaitu mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat tahun 2017, sebanyak 15 dari 27.

#### **2.1.1.2 Teori Kemiskinan**

Menurut Arsyad (2010), kemiskinan dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang diukur dari pendapatan untuk mencukupi fasilitas umum atau kebutuhan dasar kebutuhan pokoknya, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan untuk mencukupi hidupnya.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dengan melihat ketidakmerataan dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Atau pendapatan masih rendah di antara lingkungan sekitar.

Menurut Suryawati (2018), persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun pada tingkat penyusun kebijakan pembangunan Mempunyai pendidikan yang rendah. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan yang memadai.
2. Tingkat pendidikan yang relatif rendah.
3. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur.
4. Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (slumarea).
5. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya. (Ley, 2019)

### **2.1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keparahan Kemiskinan**

Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya kesempatan kerja. (Prayoga et al., 2021)

Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya disparitas antar daerah dan golongan masyarakat, akibat tidak meratanya distribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar. Pemerintah sendiri selalu merencanakan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun, namun tingkat kemiskinan di Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan, walaupun data di BPS menunjukkan kecenderungan penurunannya, namun secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata malahan kondisinya semakin memprihatinkan tiap tahunnya.

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia perl diketahui sebenarnya faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan atau mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia sehingga kedepannya dapat diformulasikan sebuah kebijakan publik yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini. Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah.

## **2.1.2 Pendidikan**

### **2.1.2.1 Pengertian Pendidikan**

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No.20 Tahun 2003).

Sedangkan menurut Notoatmodjo (2017:16), mengartikan pendidikan merupakan usaha yang terencanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, sekelompok, atau masyarakat agar mereka melaksanakan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Menurut (Sastrohadiwiryono, 2019) pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kepribadian dan mengembangkan kualitas dan keahlian manusia, jasmani dan rohani yang berjalan sepanjang hidup, baik didalam maupun diluar lingkungan sekolah, untuk membangun kesatuan masyarakat adil makmur dan selalu ada dalam keseimbangan.

Secara umum tujuan dari pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang esa dan berbudi perkerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, keperibadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dari pengertian tersebut tampak jelas bahwa adanya peranan pendidikan dalam menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas. Melalui proses pembangunan pendidikan dalam menciptakan sumber

proses pembangunan bangsa dan Negara. Oleh karena itu pendidikan sangat penting karena merupakan kunci utama menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. (Mahsunah, 2020)

Hubungan pendidikan dengan kemiskinan sama pentingnya dengan investasi dalam modal fisik untuk mencapai kesuksesan. Pendidikan merupakan investasi yang dapat menunjang kesuksesan ekonomi pada suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan menunjang tingkat kemakmuran masyarakat dan dapat menekan angka kemiskinan. Hal ini menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif.

#### **2.1.2.2 Tujuan Pendidikan**

Menurut (Illich, 2018), suatu sistem pendidikan yang baik harus mempunyai tiga tujuan. Pertama, ia harus menyediakan bagi semua orang yang ingin belajar peluang untuk menggunakan sumber-sumber daya yang ada pada suatu ketika dalam kehidupan mereka. Kedua, ia harus mengizinkan semua orang yang ingin membagikan apa yang mereka ketahui, untuk menemukan orang yang ingin belajar dari mereka.

Tujuan pendidikan menurut Dewey (2019), ialah membentuk manusia untuk menjadi warga negara yang baik. Untuk itu, disekolah - sekolah di ajarkan segala sesuatu kepada anak yang perlu bagi kehidupannya dalam masyarakat, sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara. Anak harus didik untuk menjadi orang yang dapat menurut pimpinan dan dapat memberikan pimpinan atau menjadi orang yang ahli dalam suatu teknik, perindustrian, dan lain-lain.

### **2.1.2.2 Indikator Pendidikan**

#### **a. Melek Huruf**

Melek huruf atau melek aksara adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Kemampuan membaca sangat penting untuk pemeliharaan dan pengembangan kehidupan suatu masyarakat. Dalam dunia pendidikan, kegiatan membaca dapat dipandang sebagai jantungnya pendidikan. Melalui kegiatan membaca, setiap orang dapat mengikuti perkembangan baru yang terjadi dalam kehidupan.

#### **b. Rata-rata Lama Sekolah**

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjangkau sebanyak banyaknya masyarakat untuk menjadi warga terdidik agar kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Namun peluang untuk meraih pendidikan bagi masyarakat harus disertai dengan jaminan pendidikan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan lapangan. Mobilitas untuk memperluas jangkauan meraih kesempatan berpendidikan harus mengarah pada kompetensi lulusan dan penyebaran lulusan.

Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia umur 15 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah penduduk usia umur 15 tahun ke atas merupakan cerminan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan. Rata-rata lama sekolah merupakan



indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk.

### **2.1.3 Angkatan Kerja**

#### **2.1.3.1 Pengertian Angkatan Kerja**

Angkatan kerja menurut Sukirno (2015:18) adalah jumlah total tenaga kerja yang ada dalam suatu perekonomian pada saat tertentu. Orang yang bekerja dan orang yang mencari pekerjaan membentuk angkatan kerja. Mereka yang bersekolah, yang mengurus rumah tangga dan kelompok orang lain yang mendapat uang sekarang sudah tidak bekerja. Penduduk usia kerja yang bekerja atau yang mempunyai pekerjaan tetapi menganggur sementara dan sedang mencari pekerjaan dapat disebut juga sebagai angkatan kerja. Tenaga kerja, sebagaimana didefinisikan oleh Mulyadi, adalah bagian dari tenaga kerja yang secara aktif melakukan atau berusaha melakukan kegiatan produktif, seperti produksi barang dan jasa yang dipekerjakan.

Menurut Badan Pusat Statistik Persentase individu yang bekerja ataupun mencari pekerjaan di pasar tenaga kerja dikenal sebagai tingkat partisipasi angkatan kerja, yang memperlihatkan proporsi tenaga kerja yang tersedia untuk bekerja di berbagai industri. Distribusi penduduk yang aktif dengan ekonomi diprofilkan oleh pengelompokan angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin serta kelompok umur biasanya digunakan untuk menunjukkan proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif dengan ekonomi disebuah negara atau kawasan serta ketersediaan tenaga kerja untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Perbandingan jumlah penduduk pada angkatan kerja dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia kerja tersebut disebut tingkat partisipasi kerja atau angkatan kerja (Murialti, 2020).

Muh. Asfar Muhsini (2019) yang dinyatakan bahwa angkatan kerja/tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena hubungan angkatan kerja dengan kemiskinan sangat erat. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan peningkatan kemiskinan karena orang yang tidak bekerja tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil. Sebaliknya, ketika tingkat pekerjaan naik, cenderung mengurangi tingkat kemiskinan karena lebih banyak orang memiliki akses terhadap penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

#### **2.1.3.2 Konsep Ketenagakerjaan**

Konsep ketenagakerjaan yang berlaku secara umum, meliputi Nainggolan (2019):

- a. Manpower (tenaga kerja) atau penduduk usia kerja (UK)

Tenaga kerja yakni penduduk usia kerja (usia lebih dari 15 tahun) atau total penduduk dalam sebuah negara yang bisa memproduksi jasa dan barang apabila terdapat permintaan terhadap tenaga mereka, serta apabila mereka bersedia berpartisipasi dalam kegiatan itu.

- b. Labor force (Angkatan Kerja)

Angkatan kerja yakni bagian dari tenaga kerja yang berusaha untuk terlibat atau sesungguhnya terlibat dalam aktivitas produksi jasa dan barang, maka yang

dimaksud angkatan kerja ialah penduduk yang memiliki aktivitas pokok selama seminggu yang lalu bekerja (K) serta penduduk yang tengah mencari pekerjaan (MP). Angkatan kerja yang masuk kategori bekerja jika minimum bekerja selama satu minggu adalah 1 jam untuk aktivitas produktif sebelum dilakukannya pencacahan. Mencari pekerjaan yakni individu yang memiliki aktivitas utama tengah mencari pekerjaan, atau sementara dengan mencari pekerjaan serta selama satu minggu yang lalu belum bekerja minimal 1 jam. Untuk menghitung Angkatan Kerja, digunakan rumus sebagai berikut:

$$(\text{Angkatan Kerja} = \text{orang yang bekerja} + \text{penganggur})$$

Penjumlahan angka angkatan kerja umumnya dinamakan dengan *labor supply* (penawaran angkatan kerja). Sementara penduduk sebagai tenaga kerja atau pekerja dinamakan *labor demand* (permintaan angkatan kerja).

c. Bukan Angkatan Kerja (*unlabor force*)

Bukan angkatan kerja yakni penduduk yang memiliki usia lebih dari 15 tahun akan tetapi aktivitas utamanya selama satu minggu yang lalu ialah mengurus rumah tangga, sekolah, serta sebagainya. Jika individu yang sekolah, mereka bekerja selama satu minggu yang lalu minimal 1 jam, akan tetapi aktivitas utamanya ialah sekolah, maka ia tetap tergolong bukan angkatan kerja. Terdapat beberapa yang lain yang termasuk dalam transisi antara sekolah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau tidak dalam kelompok BAK (bukan angkatan kerja). Jumlah usia kerja berdasarkan identitas, memanfaatkan rumus di bawah ini:

$$UK = AK + BAK$$

$$(\text{Usia kerja} = \text{Angkatan kerja} + \text{Bukan Angkatan kerja})$$

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*labor force participation rate*)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memperlihatkan jumlah angkatan kerja dalam sebuah kelompok umur sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur itu, yaitu melalui melakukan perbandingan antara angkatan kerja dengan tenaga kerja. Perhitungan TPAK memanfaatkan rumus di bawah ini:

$$\text{TPAK} = \text{AK/UK} \times 100\%$$

$$(\text{TPAK} = \text{Angkatan Kerja/ Usia Kerja} \times 100\%)$$

e. Tingkat Pengangguran (*unemployment rate*)

Tingkat pengangguran yakni angka yang memperlihatkan banyaknya jumlah angkatan kerja yang tengah aktif mencari pekerjaan, yakni melakukan perbandingan terhadap jumlah orang yang menacari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. Rumus untuk perhitungan TP (Tingkat Pengangguran), yakni:

$$\text{TP} = \text{MP/AK} \times 100\%$$

$$(\text{Tingkat Pengangguran} = \text{jumlah penganggur/Angkatan Kerja} \times 100\%)$$

### 2.1.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi TPAK

Berikut beberapa faktor yang memengaruhi besarnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sesuai pemaparan dari Sumarsono (2019), yaitu:

a. Jumlah Penduduk Bersekolah

Jumlah penduduk yang bersekolah yang semakin besar, maka akan menjadikan jumlah angkatan kerja semakin kecil serta TPAK juga akan semakin kecil. Kondisi tersebut dipengaruhi tingkat penghasilan keluarga dan tingkat penyediaan fasilitas pendidikan.

b. Umur Penduduk

Penduduk dengan umur yang muda secara umum belum memiliki tanggung yang besar sebagai pencari nafkah, serta mereka juga secara umum masih bersekolah. Penduduk berumur 22 hingga 55 tahun, khususnya laki-laki biasanya dituntut untuk mencari nafkah, oleh karenanya TPAKnya relative besar. Sementara penduduk dengan usia melebihi 55 tahun, sudah menurun kemampuan bekerjanya, serta TPAKnya relatif rendah.

c. Jumlah Penduduk Mengurus Rumah Tangga

Dalam suatu keluarga, biasanya ditentukan siapa bekerja, mengurus rumah tangga, dan bersekolah. Bertambah banyaknya anggota keluarga yang mengurus rumah tangga, akan menjadikan TPAK semakin kecil.

d. Tingkat Upah

Bertambah tingginya tingkat upah dalam masyarakat, bertambah banyak anggota keluarga yang tertarik masuk industri (bekerja), oleh karenanya akan bertambah tinggi pula Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

e. Tingkat Pendapatan dan Jumlah Tanggungan Keluarga

Keluarga berpendapatan bahwa besar relatif terhadap biaya hidup sehari-hari cenderung memperkecil jumlah anggota keluarga untuk bekerja. Kebalikannya, keluarga dengan biaya hidup sangat besar relatif kepada

penghasilnya cenderung untuk memperbanyak jumlah anggota keluarga bekerja. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

f. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang semakin tinggi, menjadikan waktu yang disediakan untuk bekerja juga semakin banyak. Khususnya untuk wanita, dengan tingginya pendidikan maka semakin besar kecenderungan untuk bekerja.

g. Kegiatan Ekonomi

Program pembangunan di satu sisi memaksa keterlibatan lebih banyak orang, di lain sisi, program pembangunan menumbuhkan berbagai harapan baru. Harapan agar bisa ikut menikmati hasil pembangunan itu dinyatakan dalam peningkatan partisipasi kerja. Sehingga, kegiatan ekonomi yang semakin bertambah, maka semakin besar TPAK.

## **2.1.4 UMR**

### **2.1.4.1 Pengertian UMR**

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industry untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak disetiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi. Menurut Permenno. 1 Th. 999 Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0- 1 tahun, berfungsi sebagai jarring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan. Apabila kita merujuk ke

Pasal 94 Undang-Undang (UU) no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit –dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dengan adanya standar upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diharapkan dapat memberikan penghasilan yang layak bagi para pekerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas pekerja dapat meningkat.

#### **2.1.4.2 Teori-teori UMR**

Berikut ini adalah teori – teori mengenai upah yaitu:

a. Teori upah hukum alam

Adalah upah yang ditetapkan atas dasar biaya yang diperlukan untuk memelihara atau memulihkan tenaga pekerja yang telah dipakai untuk melakukan suatu pekerjaan itu, agar dapat terus digunakan dalam proses produksi.

Maksud dari teori ini adalah besaran upah yang dikeluarkan oleh perusahaan harus mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk para pekerja mampu bertahan hidup serta mencukupi kebutuhan keluarganya.

b. Teori upah hukum besi

Teori ini dipakai oleh para ahli ekonomi liberal untuk memperdaya kaum pekerja sehingga upah pekerja tersebut terlalu mencekam. Keadaan ini mengekang kebutuhan hidup para buruh, sedangkan kebutuhan pengusaha yang mempekerjakan sangat berlebihan.

Teori ini sangat merugikan karyawan, karena gaji yang dibayarkan terlalu kecil sehingga kebutuhan mendasar para karyawan sering kali tidak terpenuhi dan disisi lain keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan hanya dinikmati oleh para petinggi perusahaan, pemilik, dan pemegang saham.

c. Teori persediaan upah

Menurut Stuwart Mill senior bahwa dalam suatu masyarakat untuk pembayaran upah sudah tersedia suatu jumlah tertentu. Teori ini menerangkan bahwa untuk besaran pembayaran upah sudah memiliki aturan tersendiri dalam hal ini peraturan tersebut ditentukan oleh pemerintah dalam bentuk upah minimum kabupaten dan upah minimum regional.

d. Teori upah etika

Teori ini sangat memperhatikan nasib pekerja, menghendaki supaya perihal upah juga ditinjau dari sudut etika yaitu bahwa upah harus menjamin penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

Teori ini dinilai paling memihak kedua belah pihak yaitu perusahaan dan nasib pekerja. Perusahaan memberikan upah atau gaji dengan melakukan beberapa pertimbangan termasuk untuk membantu mensejahterakan keluarga para pekerja agar mampu menjalani kehidupan dengan layak tanpa kekurangan dari segi Finansial.

#### **2.1.4.3 Upah Minimum Terhadap Standar Layak Hidup**



Kebijakan upah di Indonesia menunjuk pada standar kelayakan hidup bagi para pekerja. Undang-Undang Republik Indonesia No.13/2015 tentang Tenaga Kerja menetapkan bahwa upah minimum harus didasarkan pada standar kebutuhan hidup layak (SHL). Pasal 1 ayat 1 dari peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/2014, mendefinisikan upah sebagai “upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan hidup”. Sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja, upah yang diberikan dalam bentuk tunai harus ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan yang ditetapkan secara regional, sektoral maupun subsektoral.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Penelitian-penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun kajian terhadap peneliti yang dilakukan penulis, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	I Kadek Yoga Darma Putri dan Dr. IG. W. Murjana Yasa 2018) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Umr Terhadap Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali”	Variabel terikat yang sama yaitu Tingkat Kemiskinan dan variabel bebas yang sama yaitu UMR.	Variabel bebas yang berbeda yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran).	Berdasarkan hasil pengujian pertumbuhan ekonomi dan UMR memiliki pengaruh signifikan dengan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan, sedangkan UMR dan tingkat pengangguran berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.7, No. 11 September 2018
2	Muna Muttaqin dan Khairil Anwar (2023) dengan judul “ Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia”	Variabel terikat yang sama yaitu Kemiskinan dan variabel bebas yang sama yaitu Angkatan Kerja.	Variabel bebas yang berbeda yaitu Inflasi, Tingkat Pengangguran .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengujian jangka pendek variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan, tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.	Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi Volume 2, No. 2, Desember 2023
3	Deris Desmawan, dkk. (2023) dengan judul “ Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi Terhadap	Variabel terikat yang sama yaitu Kemiskinan , dan variabel bebas Angkatan Kerja dan	Tidak ada variabel bebas Pendidikan.	Uji parsial menunjukkan bahwa sementara tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki dampak yang besar dan positif terhadap kemiskinan di Provinsi Banten, variabel upah minimum provinsi	Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi) Vol. 3 No. 2 April 2023 Page 1156-1164

No	Penelitian, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kemiskinan Di Provinsi Banten ”.	Upah Minimum.		memiliki dampak negatif dan kecil terhadap jumlah penduduk miskin.	
4	Sinarta Putra P. Surbakti, Masruri Muchtar, dsn Pardomuan Robinson Sihombing (2023) dengan judul “ Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2021”	Variabel terikat yang sama yaitu kemiskinan. Variabel bebas yang sama yaitu pendidikan	Variabel bebas yang berbeda yaitu angka melek huruf	Penduduk Miskin Tahun Sebelumnya secara simultan mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin.	Ecoplan Vol. 6 No. 1, April 2023, hlm 37-45
5	Nadia Islami, dan Ali Anis (2019) dengan judul “ Pengaruh upah minimum provinsi, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di indonesia”	Variabel terikat yang sama yaitu Kemiskinan variabel bebas yang sama yaitu Upah Minimum dan Pendidikan.	Variabel bebas yang berbeda yaitu Kesehatan	Hasil pengujian hipotesis UMP berpengaruh negatif, rerata sekolah dan IPM sendiri belum ditemukan pengaruhnya pada tenaga kerja industri manufaktur besar dan menengah di Pulau Sumatera tahun 2018-2020.	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 23, No.1 Juli 2023
6	Muhammad Idris Thahir, Baharuddin Semmaila dan Aryati Arf Ah (2014) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Takala”	Variabel terikat yang sama yaitu kemiskinan. Variabel bebas yang sama yaitu Pendidikan.	Variabel bebas yang berbeda yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kesehatan.	Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan hasil pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan, Pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan, sehatan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten takalar	Journal of Management Science (JMS) Volume 2 No. 1(2021) Januari-Juni

No	Penelitian, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Sinarta Putra P. Surbakti , dkk (2023) dengan judul “ Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2021	Variabel terikat yang sama yaitu Kemiskinan. Variabel Pendidikan.	Variabel bebas yang berbeda yaitu tidak ada upah minimum dan angkatan kerja.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang ditunjukkan dengan Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun Sebelumnya secara simultan mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin	Ecoplan Vol. 6 No. 1, April 2023, hlm 37-45
9	Giovan F.Ch Mengko (2023) denga judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kota Tomohon”	Variabel terikat yang sama yaitu Kemiskinan. Variabel bebas yang sama yaitu pendidikan dan upah minimum.	Variabel bebas yang berbeda yaitu pertumbuhan ekonomi.	Secara parsial variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Kota Tomohon, Secara parsial variabel Upah Minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, Secara parsial variabel Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan, Secara parsial variabel Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 23 No. 2 Bulan Februari 2023
10	Febriangga Sembiring dan Tarmizi dan Rujiman (2020) dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja	Variabel terikat yang sama yaitu Kemiskinan. Variabel bebas yang sama yaitu Angkatan Kerja .	Variabel bebas yang berbeda yaitu Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Penganggura n Terbuka.	Analisis data menampilkan variabel Perkembangan Ekonomi dan Tingkat Tunakarya Terbuka memberikan efek positif dan nyata pada variabel Indeks Perkembangan Manusia dan Level Partisipasi Angkatan Kerja tidak signifikan pada	Serambi Engineering, Volume V, No. 2, April 2020

No	Penelitian, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara”			terhadap kemiskinan di provinsi Sumatera Utara.	
11	Yulia Adella Sari (2021) dengan judul “Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah”	Variabel terikat yang sama yaitu Kemiskinan. Variabel bebas yang sama yaitu upah minimum	Variabel bebas yang berbeda yaitu indeks Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk..	Hasil penelitiannya yaitu upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah, serta jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.	Equilibrium Volume 10. No. 2. Tahun 2021
12	Erliza Millenia Putra dan Dewi Zaini Putri (2021) dengan judul “Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia”	Variabel terikat yang sama yaitu Kemiskinan. Variabel bebas yang sama yaitu Upah dan Pendidikan.	Variabel bebas yang berbeda yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka.	Hasil penelitian ini menunjukkan upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.	Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan Volume 10, Nomor 2, November 202
13	Farda Kirana Harira dan Syarituah Sirega(2013) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah	Variabel terikat yang sama yaitu Kemiskinan. Variabel bebas yang	Variabel bebas yang berbeda yaitu Tingkat pengangguran terbuka.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara tahun 2011 dan 2020, variabel pendidikan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap	JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan

No	Penelitian, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Banjarbaru Tahun 2011-2020”	sama yaitu pendidikan dan upah minimum.		kemiskinan di Banjarbaru. Variabel bebas upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Banjarbaru. Tingkat pengangguran terbuka yang merupakan variabel bebas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan kota Banjarbaru	Vol. 6 No. 2, 2023, hal 836-847
14	Fransiska Vistalia Alo dan I Wayan Sukadan (2021) dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua	Variabel terikat yang sama yaitu Kemiskinan. Variabel bebas yang sama yaitu Tingkat pendidikan dan angkatan kerja.	Variabel bebas yang berbeda yaitu Pengaruh pertumbuhan penduduk	Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dan tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) berpengaruh secara simultan di Provinsi Papua. Pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Tingkat pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan	E-Jurnal EP Unud, 12 [11]: 736-747

No	Penelitian, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Muh. Asfar Nursini, dan Muhammad Jibril Tajibu(2022) dengan judul “Analisis Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja Pengeluaran Pemerintah Dan Ipm Terhadap Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan”	Variabel terikat yang sama yaitu Kemiskinan. Variabel bebas yang sama yaitu Angkatan Kerja.	Variabel bebas yang berbeda yaitu Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, IPM.	Tenaga kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Volume 5 Issue 2 (2022) Pages 86 - 97 SEIKO : Journal of Management & Business

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Agar mempermudah penulis dalam penelitian, maka kerangka berpikir untuk menjelaskan hubungan Pengaruh Pendidikan, Angkatan Kerja, UMR terhadap Indeks Kemiskinan di Jawa Barat tahun 2017-2022.

#### 2.3.1 Hubungan Pendidikan dengan Kemiskinan

Menurut Simmons dalam Todaro (2020), pendidikan adalah suatu jalan dalam membebaskan diri dari kemiskinan. Serta pendidikan merupakan unsur dari pembangunan yang awal memainkan peran penting untuk membuat suatu negara dan dapat melatih kemampuan dalam menyerap teknologi modern sehingga terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pendidikan (baik formal maupun nonformal) memainkan peran utama terhadap penurunan kemiskinan jangka panjang, baik secara tidak sengaja, yaitu dengan proses perbaikan produktivitas, efisiensi berdasarkan khusus, maupun secara langsung, yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan pada golongan

miskin dan memberi kemampuan keterampilan yang guna memperbaiki atau digunakan dalam meningkatkan kualitas seseorang sehingga pada gilirannya bisa mampu menambah pendapatan seseorang (Arsyad, 2019).

Keterkaitan antara kemiskinan dengan pendidikan memainkan peran penting karena pendidikan mampu memberikan keahlian untuk berjaya melalui pemahaman ilmu pengetahuan dan keterampilan yang pada hakekatnya mampu mengembangkan kualitas dan produktivitas kerja dan mampu memperoleh peluang kesempatan kerja yang sangat bagus dari sebelumnya bahkan mendapatkan kesejahteraan. Pendidikan juga menekankan kesadaran akan pentingnya kejayaan manusia. Hal tersebut harus menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Suryawati, 2017).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustakim et al., 2022) yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan. Karena semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin tinggi tingkat kemiskinan dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah tingkat kemiskinan.

### **2.3.2 Hubungan Angkatan Kerja dengan Kemiskinan**

Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja (manpower) sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sisi, salah satunya dari ketenagakerjaan. Tujuan setiap orang yang bekerja pada akhirnya adalah untuk mendapatkan penghasilan, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, pemerintah berupaya meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja, karna



ketenagakerjaan dapat menjadi pemicu masalah terjadinya kemiskinan jika jumlah penduduk yang tidak bekerja lebih banyak akan menyebabkan peningkatan penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan.

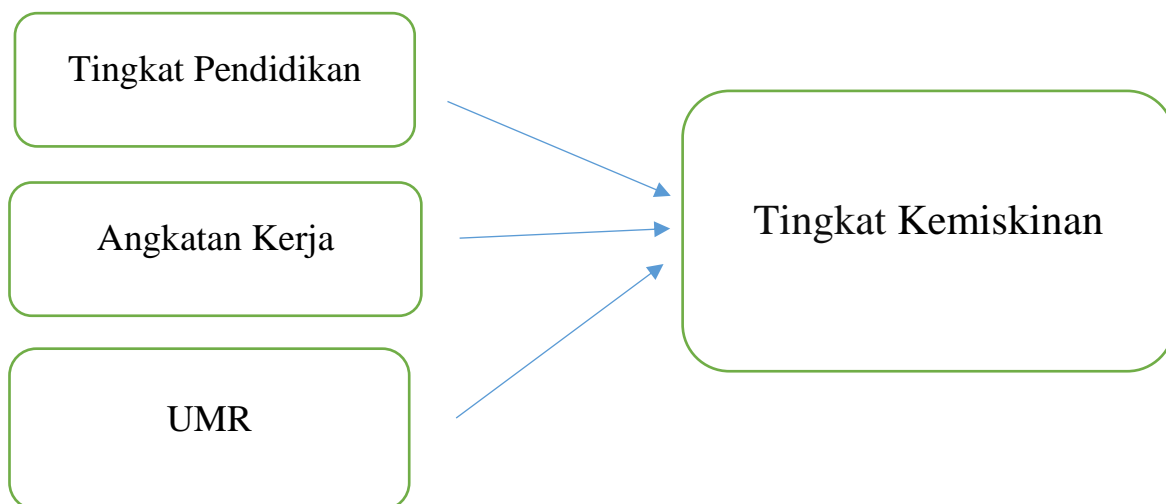
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini sofia dan Ris Nugroho (2018) yang dinyatakan bahwa angkatan kerja/tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ini berarti semakin banyak Angkatan kerja namun tidak bekerja akan semakin menambah jumlah Masyarakat miskin.

### **2.3.3 Hubungan Upah Minimum Regional dengan Kemiskinan**

Upah Minimum Regional (UMR) merupakan salah satu indikator untuk mengatasi tingkat pengangguran. Melalui upah minimum regional kemiskinan akan terminimalisir karena dapat mengatasi masalah pengangguran dalam masyarakat. Upah yang tinggi akan menyebabkan turunnya jumlah pekerja dan mengakibatkan angka kemiskinan semakin tinggi. Upah yang tinggi akan mengindikasikan biaya produksi yang tinggi pula. Dengan begitu, perusahaan akan mengurangi kapasitas produksinya dan pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kemiskinan yang pasti akan terjadi (Said, 2017). Masyarakat dengan upah minimum regional yang rendah dalam suatu daerah atau wilayah memiliki standar hidup dengan tingkat konsumsi yang rendah juga, dan sebaliknya jika upah minimum regional tinggi maka masyarakat daerah ataupun wilayah tersebut memiliki standar hidup serta tingkat konsumsi yang tinggi pula. Melalui pemberian Upah Minimum Regional akan membantu peningkatan pendapatan masyarakat dan

dapat meminimalisir masalah kemiskinan. Peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Sukmaraga, 2018).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sabyan Muhammad & Widyanti Rina, 2022) yang dinyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini karena dengan adanya standar upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diharapkan dapat memberikan penghasilan yang layak bagi para pekerja/karyawan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas pekerja dapat meningkat.



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2018). Maka dari rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang ada dapat dibuat beberapa hipotesis yang menjadi landasan dalam penelitian ini :

1. Diduga secara parsial Tingkat Pendidikan, dan UMR berpengaruh Negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.
2. Diduga secara parsial Angkatan Kerja berpengaruh Positif terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.
3. Diduga secara bersama-sama Tingkat Pendidikan, Angkatan Kerja dan UMR berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.